

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan uraian yang telah dibahas di atas, peran Pemerintah dalam pengelolaan FDI masih cukup vital. Dalam pengelolaan FDI dari Tiongkok Pemerintah memegang peran utama sebagai pembuat kebijakan. Melalui kebijakan yang dirancang agar dalam proses pengelolaannya dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia. Bukan hanya manfaat langsung namun manfaat secara struktural yang nantinya akan membantu Indonesia dalam mewujudkan pembangunannya. Kebijakan pengelolaan FDI yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ini dipahami melalui Konsep *FDI and Development* karya Theodore H. Moran,

Melalui konsep ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diberlakukan di Indonesia dalam proses pengelolaan FDI khususnya dari Tiongkok itu sudah di bentuk ke arah keberlanjutan. Melalui kebijakan investasi yang berbasis *transparency of payment*, proses aliran dana FDI dapat diakses oleh publik. Publik juga dapat mendapatkan data-data yang lebih mendetail untuk keperluan riset dan lainnya melalui laman khusus. Aspek ini perlu diterapkan agar publik dapat memantau secara langsung aliran dana FDI dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Dengan harapan dapat mengawasi dampak dan memaksimalkan potensi yang dapat diserap. Melalui *transparency of payment* juga diharapkan agar keterbukaan ini memaksimalkan regulasi *anti bribery*. Meskipun Indonesia sudah

melakukan transparansi dalam aliran dana FDI sari Tiongkok, namun Indonesia belum sepenuhnya menerapkan konvensi *anti-bribery* yang telah ditetapkan OECD sebagai standarisasi Internasional. Indonesia masih dalam prosesnya untuk menuju integrasi penerapan konvensi ini. Penerapan konvensi ini perlu segera dilakukan agar menjadi standarisasi dan penjamin bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Melalui FDI Tiongkok ini juga kebijakan domestik di Indonesia juga sudah berfokus untuk mengubah pola ekonomi masyarakat lokal. Melalui *multiplier effect* yang di dapatkan atas terbukanya lapangan kerja baru, yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah berlangsungnya proyek. Melalui pembentukan berbagai Kawasan Ekonomi Khusus yang tentunya membentuk perubahan pola ekonomi masyarakat sekitar. Peningkatan pola ekonomi juga dapat dicapai melalui pelatihan kompetensi bagi tenaga kerja. Kebijakan Indonesia yang telah mengadakan berbagai program pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja yang melibatkan pihak investor melalui pemberian fasilitas insentif meningkatkan perubahan pola ekonomi di Indonesia. Bahkan memberikan kesempatan bagi pelajar dan tenaga kerja Indonesia untuk mempelajari teknologi baru yang sebelumnya belum ada di Indonesia.

Reformasi kebijakan dan sistem perizinan berbasis risiko yang telah dirancang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 serta berbagai paket insentif fiskal dan non fiskal (*tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan bea masuk) telah mempercepat perbaikan iklim bisnis

lokal, dengan kebijakan yang menjamin partisipasi UMKM, kemudahan akses akan modal, serta proses transparan yang dapat diakses melalui laman OSS. Kebijakan investasi di Indonesia pun sudah dirancang berpihak pada lokal. Kebijakan pemerintah Indonesia juga adil dan sama rata karena memberikan pembiayaan impor bebas pajak yang sama kepada pihak asing maupun lokal. Dalam proses peningkatan iklim bisnis lokal ini juga, peningkatan kualitas dari produk domestik perlu terus dilakukan sehingga vendor lokal menjadi mampu bersaing di rantai pasok global.

Promosi Investasi yang sebagian besar prosesnya merupakan peranan dari BKPM sebagai koordinator penanaman modal di Indonesia. BKPM mendampingi para investor mulai dari penakaran potensi hingga mendampingi proses realisasi berhasil menarik banyak FDI. Termasuk FDI dari Tiongkok sebagai salah satu negara dengan asal FDI terbanyak di Indonesia yang cakupannya ke berbagai sektor serta wilayah di Indonesia. BKPM juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian sesuai dengan FDI yang masuk ke sektor mana saja. Melalui OSS BKPM berhasil menciptakan kesinambungan antar bagian untuk mewujudkan pembangunan dan keberlanjutan dari investasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa promosi investasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas modal yang masuk, tetapi juga pada kualitas dan dampaknya terhadap pembangunan nasional. Melalui berbagai instrumen kebijakan tersebut, BKPM berperan sebagai katalisator yang menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan kebutuhan pembangunan domestik, sehingga investasi yang masuk dapat berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi

yang inklusif, peningkatan daya saing industri dalam negeri, dan pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.

FDI Tiongkok terbukti berkontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan di Indonesia, seiring dengan semakin efektifnya kebijakan pemerintah dalam mengelolanya. Empat indikator utama dalam teori *FDI and Development* yaitu *transparency of payment*, perbaikan pola ekonomi, peningkatan iklim bisnis lokal, dan promosi investasi telah dijalankan dengan cukup baik. Pemerintah Indonesia mendorong keterbukaan dalam arus pembayaran dan perizinan proyek, memperkuat struktur ekonomi dengan memfasilitasi transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja, serta melakukan reformasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif. Promosi investasi juga diarahkan pada sektor-sektor strategis dan berkelanjutan, sehingga investasi Tiongkok tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga mendukung agenda pembangunan jangka panjang. FDI Tiongkok membentuk mencapai pembangunan maksimal di tingkat domestik. Dengan pendekatan kebijakan yang lebih terarah dan inklusif ini, pengelolaan FDI Tiongkok di sektor transportasi tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga selaras dengan SDGs, khususnya dalam aspek infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemitraan global. Melalui pengelolaan yang efektif untuk mendapatkan manfaat maksimal Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan FDI Tiongkok yang masuk di berbagai sektor di Indonesia untuk mencapai agenda global *Sustainable Development Goals*.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat pengelolaan FDI Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu terus memperkuat transparansi dalam pengelolaan proyek investasi, dapat dilakukan melalui menyempurnakan keanggotaan dalam OECD sehingga terjamin sesuai standar internasional yang terkandung dalam konvensi *anti bribery* sehingga transparansi dapat terjaga dan kepercayaan publik dan mitra internasional meningkat serta. Juga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap keterlibatan pelaku lokal, baik dalam rantai pasok maupun dalam transfer pengetahuan, guna memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata dan mendukung pembangunan kapasitas nasional. Ketiga, pemerintah disarankan untuk menyusun kebijakan promosi investasi yang lebih selektif dan berbasis keberlanjutan, sehingga FDI yang masuk tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan SDGs. Terakhir, sinergi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus diperkuat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih konsisten dan adaptif terhadap dinamika global maupun kebutuhan domestik. Namun dalam ruang lingkup kajian akademik peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan dan perlu diteliti lebih lanjut, penelitian lanjutan dapat lebih difokuskan pada aspek atau sektor tertentu yang lebih mengerucut jangkauannya.